

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bernadeth Y.P. Simangunsong

bernadeth_priskilla@borneo.ac.id
Universitas Borneo Tarakan

Charitin Devi

charitin.devi@borneo.ac.id
Universitas Borneo Tarakan

Abstract

This study aims to determine the effect of education budget allocation, unemployment, and inflation on poverty in North Sumatra Province. This type of research is a quantitative study with a total sample of 21 observation periods from 2002 to 2022. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. Multiple linear regression equation model: $LnY = b_0 + b_1LnX_1 + b_2LnX_2 + b_3LnX_3 + e$. From the research results it is known that the estimated value of the multiple linear regression equation is $LnJlhPendMiskin = 15.01147 - 0.069179 LnAngPend + 0.078522 LnUnemployment + 0.022907 LnInflation$. This study shows that there is a negative and significant effect of the education budget on poverty (probability $0.0004 < 0.05$). While unemployment and inflation have no significant effect on poverty in North Sumatra Province. With a coefficient of determination of 71.66% and simultaneously the education budget variables, unemployment and inflation have a significant effect on poverty in North Sumatra Province.

Keywords: Education Budget, Unemployment, Inflation, and Poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi anggaran pendidikan, pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 21 periode pengamatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda Model persamaan regresi linier berganda: $LnY = b_0 + b_1LnX_1 + b_2LnX_2 + b_3LnX_3 + e$. Dari hasil penelitian diketahui nilai estimasi persamaan regresi linier berganda adalah $LnJlhPendMiskin = 15.01147 - 0.069179 LnAngPend + 0.078522 LnPengangguran + 0.022907 LnInflasi$. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan anggaran pendidikan terhadap kemiskinan (probabilitas $0,0004 < 0,05$). Sedangkan pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan koefisien determinasi sebesar 71,66% dan secara simultan variabel anggaran pendidikan, pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

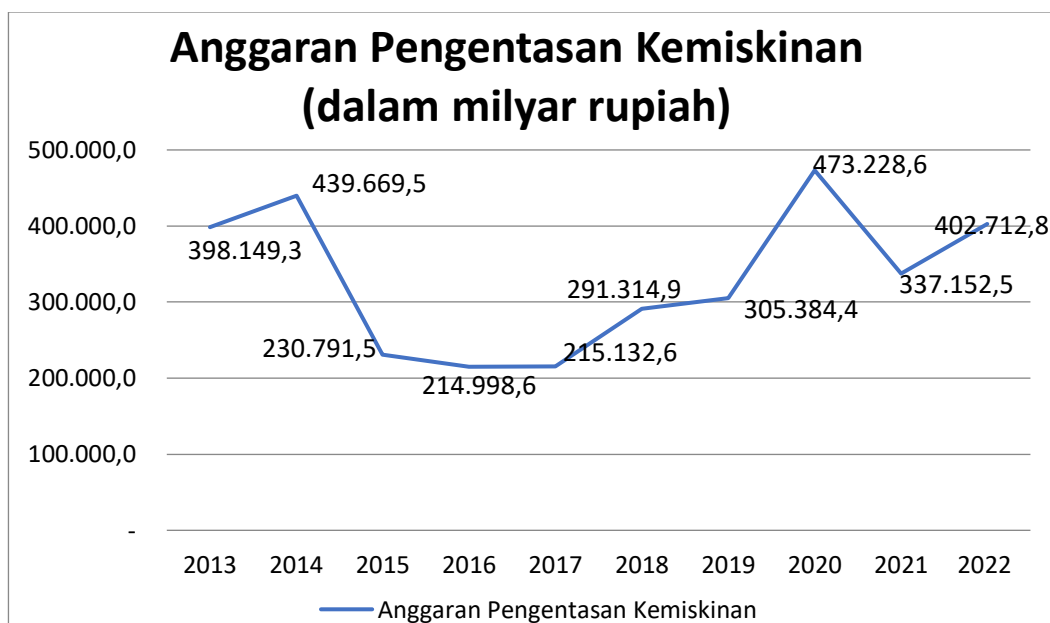
Kata Kunci: Anggaran Pendidikan, Pengangguran, Inflasi, dan Kemiskinan

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah krusial yang dihadapi dalam pembangunan oleh hampir semua negara di dunia, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah, dimana kemiskinan mengakibatkan tersitanya kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sulitnya membiayai pelayanan kesehatan, terbatasnya ketersediaan layanan publik, kurangnya jaminan dan perlindungan sosial untuk keluarga, serta yang paling parah, kemiskinan menyebabkan jutaan orang tidak memiliki cukup pangan dan sandang.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan tersebut, maka masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya Sumatera Utara dianggap penting untuk ditanggulangi dan pemerintah mengambil tindakan nyata dengan mengalokasikan dana APBN untuk anggaran kemiskinan. Alokasi anggaran kemiskinan yang digelontorkan pemerintah tersebut dibagi dalam bentuk klaster. Klaster I adalah untuk Pelayanan Kebutuhan Dasar, Klaster II berupa Pemberdayaan Masyarakat, Klaster III peruntukkannya yaitu Dukungan UMKM, dan Klaster IV yaitu Program Pro Rakyat.

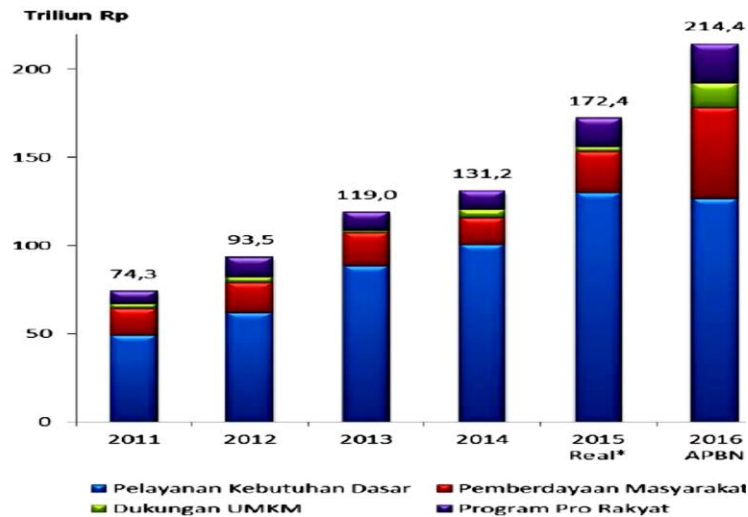
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia merilis data Anggaran Kemiskinan sebagai berikut:



Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1
Grafik Anggaran Penanggulangan Kemiskinan (triliun Rp) tahun 2013-2022

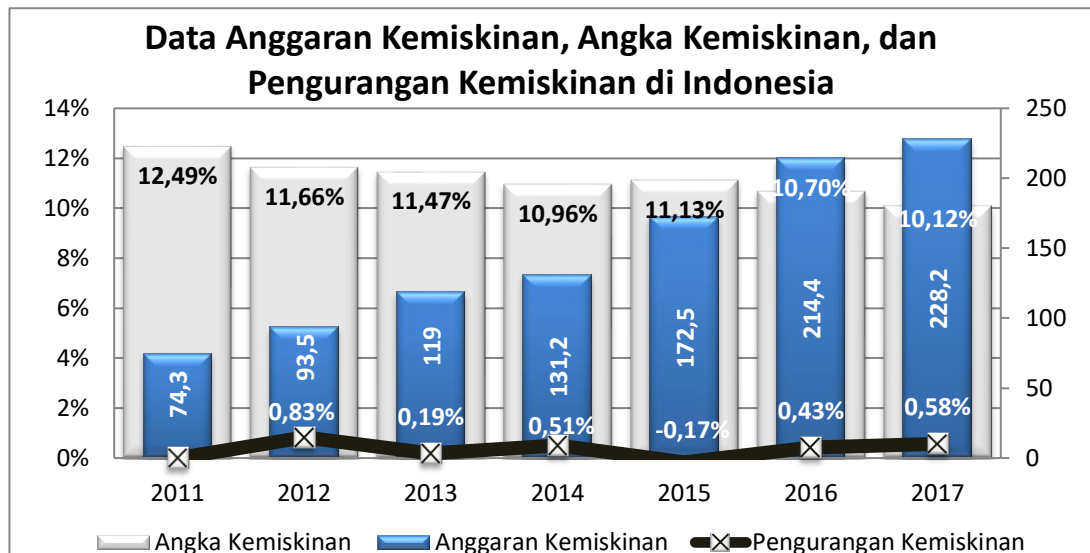
Gambar di atas menunjukkan bahwa alokasi Anggaran pengentasan kemiskinan menjadi perhatian pemerintah melalui belanja pemerintah pusat dimana anggaran tertinggi berada pada tahun 2020 yakni 473.228,6 (milyar rupiah) hal ini juga karena dampak Covid-19 sehingga pemerintah lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan beberapa stimulus bantuan sosial di tahun tersebut. Anggaran pengentasan kemiskinan posisi kedua terhadap anggaran di tahun 2014 yakni nilai 439.669,5 (milyar rupiah).



Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gambar 2

Grafik Anggaran Penanggulangan Kemiskinan (triliun Rp) tahun 2011 -2016

Realisasi dana anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2011 - 2015 sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 509,5 triliun belum termasuk anggaran kemiskinan tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 442,6 triliun yang mana data realisasi nya belum rilis sehingga masih dalam bentuk data anggaran yang tertuang di APBN. Melihat data realisasi dan anggaran kemiskinan tersebut, didapati bahwa fakta di lapangan menggambarkan hal yang tidak sejalan dimana penurunan kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak sebanding dengan besarnya dana yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam hal menanggulangi kemiskinan ini. Kondisinya dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini :



Sumber : Website Badan Pusat Statistik dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI

Gambar 3
Anggaran Kemiskinan, Angka Kemiskinan dan Pengurangan Kemiskinan

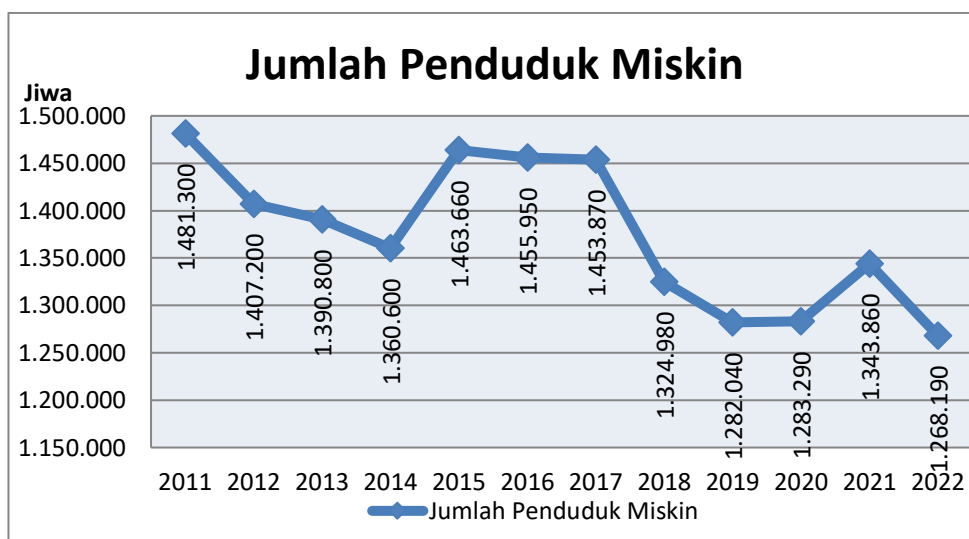
Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan dari tahun ke tahun tetapi tidak sejalan dengan kondisi pengurangan angka kemiskinan itu sendiri. Hal tersebut nampak pada tahun pengamatan 2014, anggaran kemiskinan meningkat dari 131,2 triliun rupiah menjadi 172,5 triliun rupiah di tahun 2015, dengan meningkatnya anggaran kemiskinan seharusnya hal tersebut menjadi peluang besar untuk tindakan penekanan dan pengurangan jumlah kemiskinan, namun fakta menunjukkan bahwa data angka kemiskinan naik sebesar 0,17 % yang mengisyaratkan tidak terdapat pengurangan kemiskinan.

Dari data pemaparan tersebut bahwa anggaran dana penanggulangan kemiskinan ini tidak sebanding dengan pengurangan kemiskinan yang diharapkan turun dengan program-program kebijakan pemerintah yang *pro poor*. Karena adapun angka kemiskinan terhitung rata - rata hanya berkurang 0,34% dalam kurun waktu 7 tahun. Dengan begitu adapun dana anggaran pemerintah penanggulangan kemiskinan ini keberadaannya masih menguap begitu saja. Titik beratnya terdapat pada proses pengimplementasian kebijakan pemerintah ini masih banyak terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Sehingga kebijakan ini tidak tersentuh dan dirasakan oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengimplementasian kebijakan pemerintah ini masih belum tepat sasaran, masyarakat mampu pun tidak jarang mengambil bagiannya si miskin sehingga persentase penurunan kemiskinan di Indonesia pun tidak mengalami

signifikan perubahan yang berarti.

Dengan melihat fenomena kemiskinan Indonesia di atas, Provinsi Sumatera Utara yang menjadi bagian dari salah satu provinsi di Indonesia juga mengalami keadaan yang serupa. Tingkat kemiskinan menurut data BPS pada tahun terakhir diterbitkan (BPS, 2016) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2015 adalah sebesar 1.508,14 ribu jiwa atau sekitar 10,82 % dari total jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2005.

Lebih jelas perkembangan grafik *trend* jumlah penduduk miskin Sumatera Utara dan persentase tingkat kemiskinan kurun waktu 2011-2022 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber : data diolah dari data publikasi BPS Sumut

Gambar 4
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara

Dari gambar di atas menunjukkan keadaan yang bersifat fluktuatif, pergerakan fluktuatif yang dimaksud nampak pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Tahun 2014 persentase penduduk miskin turun sebesar 2,17 % dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2015 naik kembali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besar perubahan kenaikannya sebesar 7,57 %.

Melihat trend dan fenomena yang diungkapkan di atas mengenai keadaan kemiskinan Sumatera Utara, maka adapun faktor-faktor yang ingin diteliti pengaruhnya terhadap kemiskinan adalah Anggaran Pendidikan, Pengangguran dan inflasi. Sehingga adapun penelitian ini diselesaikan untuk mencapai tujuan penelitian yakni mengetahui dampak alokasi anggaran pendidikan, pengangguran, dan inflasi di Provinsi Sumatera Utara.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data regresi liner berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Agar dalam analisis regresi diperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat uji asumsi klasik yaitu: Uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Untuk pengujian dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews* 10.0. Adapun bentuk model yang akan di uji dalam penelitian ini, yaitu :

$$\text{LnY} = b_0 + b_1\text{LnX}_1 + b_2\text{LnX}_2 + b_3\text{LnX}_3 + e$$

Y : Kemiskinan (jiwa)

b_0 : Konstanta

$b_1 \dots b_3$: Koefisien Persamaan Regresi Prediktor X_1, X_2, X_3

X_1 : Alokasi Anggaran Pendidikan (Rp)

X_3 : Inflasi (%)

X_2 : Pengangguran (jiwa)

e : Error

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai *probability* < taraf signifikansi (α) 5 %.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F-statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai *probability* < taraf signifikansi (α) 5 %.

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menganalisis kekuatan variabel variabel Alokasi Anggaran Pendidikan (X_1), Pengangguran (X_2), dan Inflasi (X_3) terhadap Kemiskinan (Y). Koefisien Determinasi yang digunakan dilihat dari hasil R^2 .

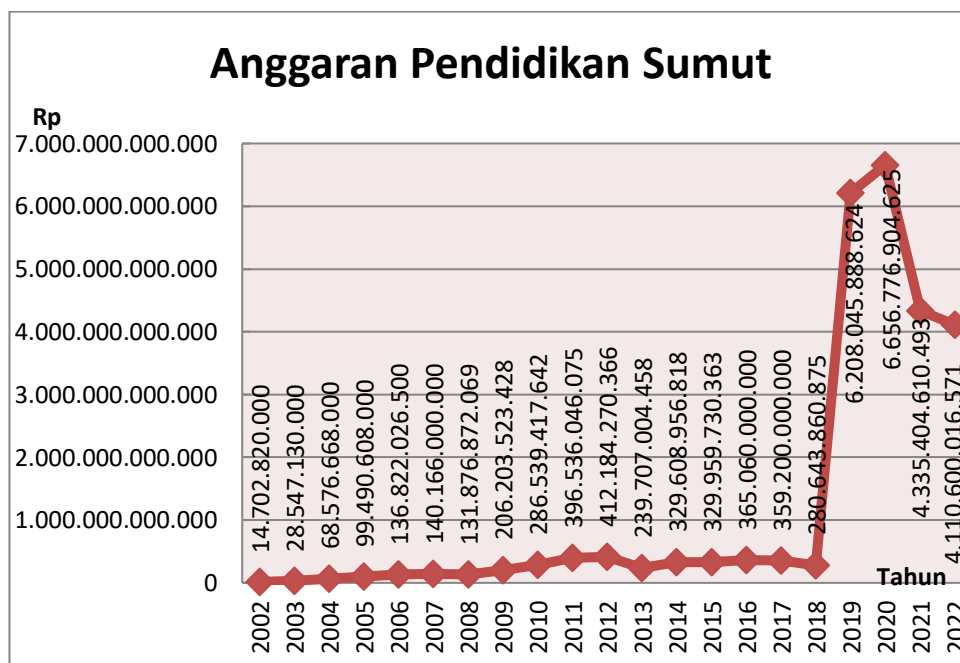
4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil

Dengan melakukan investasi pendidikan melalui anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu dirasa perlu untuk menganalisis dampak investasi sumberdaya manusia yakni dari segi anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Sehingga apabila anggaran pendidikan meningkat maka jumlah penduduk miskin akan menurun.

Dengan memperhatikan data penelitian maka trend alokasi anggaran pendidikan sebagai berikut :



Sumber : Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

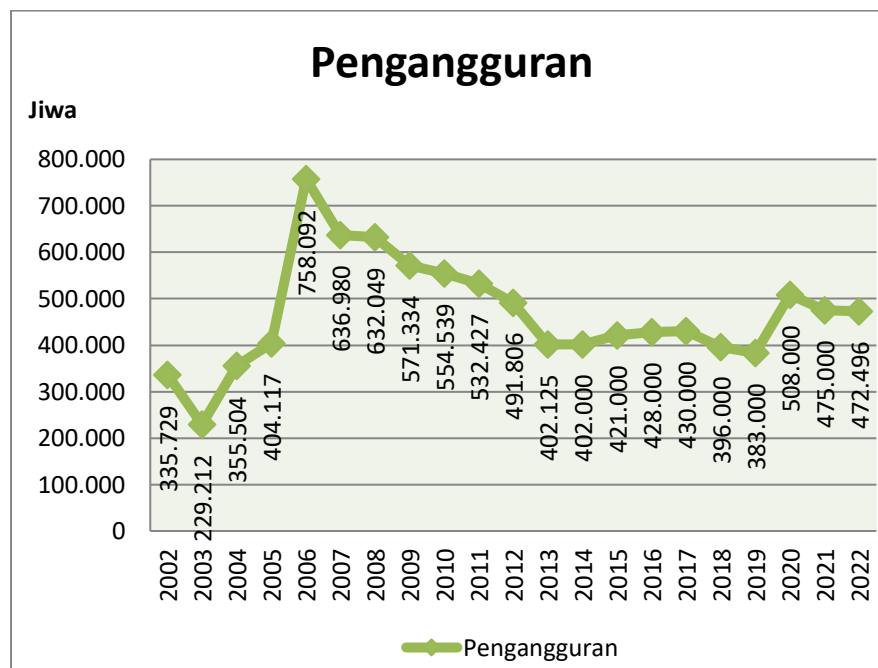
Gambar 5

Anggaran Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022

Anggaran pendidikan di Sumatera Utara terdapat pergerakan yang fluktuatif.

Terdapat alokasi anggaran yang cenderung signifikan besar dialokasikan pemerintah di tahun 2019 dan 2020 sebesar 6.208.045.888.624 rupiah dan meningkat sebesar 448.731.016.001 rupiah. Kecenderungan anggaran pendidikan menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan nilai anggaran yang berkisar nilai 14 milyar di tahun 2002 meningkat hingga di angka 6,6 triliun di tahun 2020 dan mengalami penurunan 4,1 triliun rupiah di tahun 2022.

Efek negatif pengangguran adalah menurunnya pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya taraf kesejahteraan. Menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang mereka terperangkap pada kemiskinan dikarenakan ketiadaan pendapatan. Apabila mereka tetap tidak mendapatkan pekerjaan, konsekuensinya mereka tetap saja tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka dengan baik, kondisi seperti ini berimbas kepada meningkatnya angka kemiskinan yang ada. Pada tabel berikut dipaparkan data pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022.



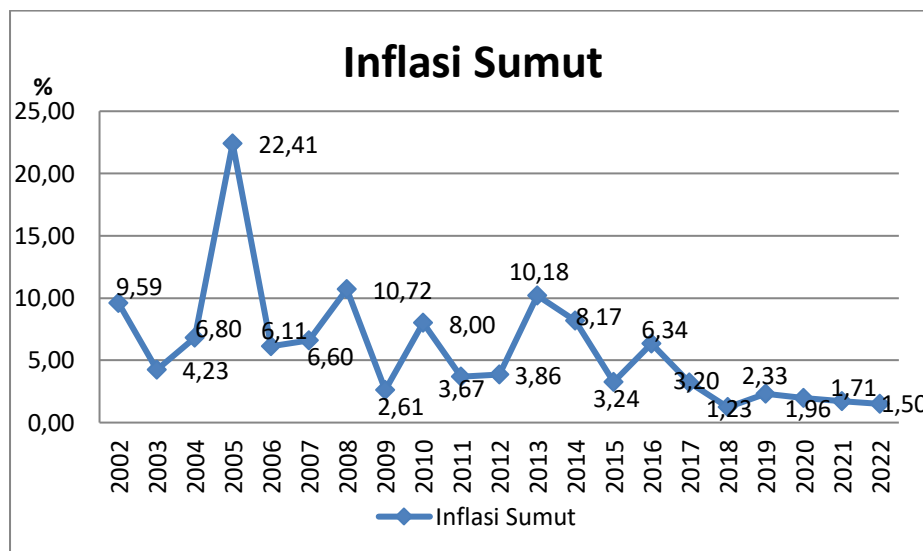
Sumber : BPS Sumatera Utara, diolah

Gambar 6
Jumlah Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022

Pengangguran di Sumatera Utara memiliki trend fluktuatif. Tahun pengamatan 2002 ke 2003 mengalami penurunan, namun di tahun 2003 ke tahun 2004 hingga tahun 2005 kembali mengalami kenaikan yang relatif cenderung kecil dan tidak signifikan. Kecenderungan kenaikan signifikan nampak terlihat pada tahun pengamatan 2005 ke 2006

dimana pengangguran tahun 2005 sebesar 404.117 jiwa meningkat menjadi 758.092 jiwa yang menganggur di tahun 2006. Sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2014 relatif menurun dengan nilai yang relatif stabil. Namun tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan kembali dengan nilai kenaikan yang cenderung kecil dan tidak signifikan. Demikian juga meningkat ditahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang dialami dunia.

Sedangkan deskripsi data dari variabel inflasi, dimana inflasi membuat kemampuan daya beli masyarakat menurun, khususnya masyarakat yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga, sehingga inflasi ini membuat upah riil setiap individu berpendapatan tetap menurun. Penurunan nilai pendapatan akan mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Berikut ini disajikan data inflasi yang terjadi di Sumatera Utara dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022:



Sumber : BPS Sumatera Utara, diolah

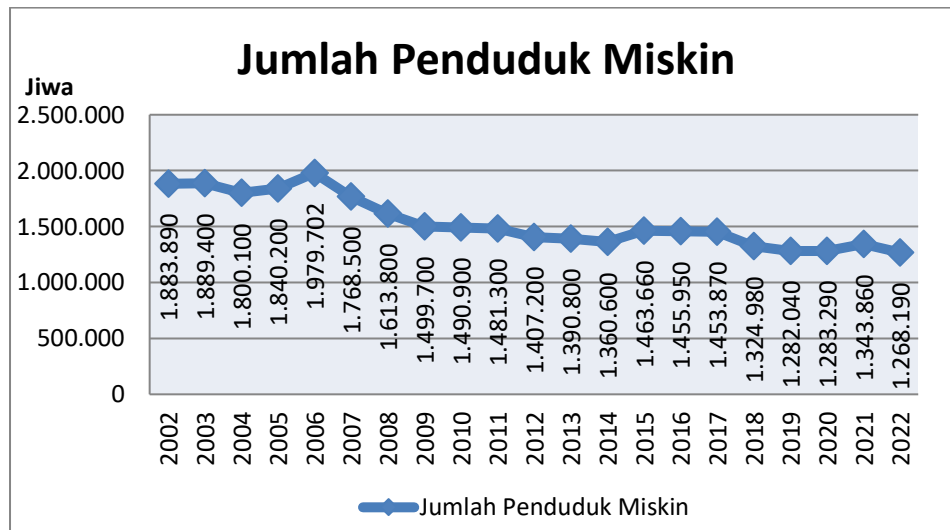
Gambar 7

Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022

Data Inflasi Sumut juga mengalami pergerakan yang fluktuatif pula namun masih terdapat angka 2 digit inflasi di beberapa tahun pengamatan, yang paling signifikan gejala inflasi terdapat pada tahun 2005 dengan besaran inflasi 22,41%. Inflasi dengan angka 2 digit juga berada pada tahun pengamatan 2008 dengan nilai 10,72 % dan di tahun 2013 pada nilai 10,18% walau dalam situasi inflasi yang diperkirakan stabil dan tidak terlalu memperparah atau membahayakan perekonomian Sumatera Utara.

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Namun dalam arti luas, menurut *World Bank* (2004), kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan

pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat



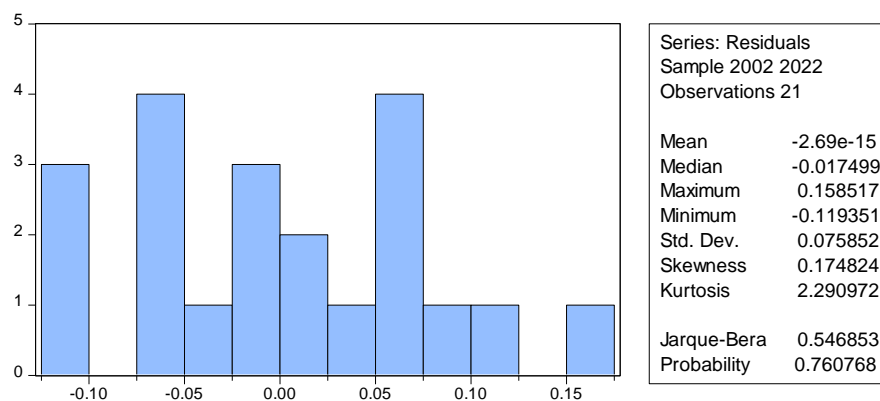
Sumber : BPS Sumatera Utara, diolah

Gambar 8

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022

Data jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara menggambarkan keadaan yang fluktuatif sepanjang tahun pengamatan, dimana angka jumlah penduduk miskin yang terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.360.600 jiwa dan tertinggi terdapat pada tahun 2006 yaitu sebesar 1.979.702 jiwa. Dan di tahun 2006 ini pula terdapat kenaikan signifikan, dengan kenaikan jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun-tahun pengamatan lainnya 2007 hingga tahun 2014 cenderung mengalami penurunan yang relatif kecil dan stabil, namun naik kembali di tahun 2015 hingga 2017 dan kemudian dialami juga pada tahun 2019 dan 2020.

Uji Asumsi Klasik



Sumber : Hasil olahan analisis data evIEWS

Gambar 9

Hasil Uji Normalitas

Gambar di atas menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dilihat dari *probability Jarque-Bera* (0,76) > 0,05 sehingga dengan kata lain dengan tingkat keyakinan 95 % model penelitian terdistribusi normal.

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas secara individual

	LN JLHPENMISKIN	LN ANG_PEND	LN PENGANGGURAN	LN INFLASI
Mean	14.23547	26.50099	13.02415	1.512495
Median	14.19645	26.38114	12.97154	1.442202
Maximum	14.49846	29.52666	13.53856	3.109507
Minimum	14.05310	23.41131	12.34240	0.207014
Std. Dev.	0.143511	1.628146	0.259679	0.752416
Skewness	0.513852	0.431304	-0.385620	0.067223
Kurtosis	1.900944	2.859058	3.815533	2.328028
Jarque-Bera	1.981090	0.668462	1.102417	0.410919
Probability	0.371374	0.715888	0.576253	0.814273
Sum	298.9449	556.5208	273.5072	31.76239
Sum Sq. Dev.	0.411905	53.01722	1.348665	11.32261
Observations	21	21	21	21

Sumber : Hasil olahan analisis data evIEWS

Tabel di atas secara individual mendukung hasil dari uji normalitas, dimana nilai *probability Jarque-Bera* tiap variabel > 0,05 dimana 1,981090 ; 0,668462 ; 1,102417 ; 0,410919 > 0,05. Berikutnya, hasil uji heterokedastisitas untuk penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.445735	Prob. F(9,11)	0.2780
Obs*R-squared	11.37966	Prob. Chi-Square(9)	0.2506
Scaled explained SS	4.313565	Prob. Chi-Square(9)	0.8896

Sumber : Hasil olahan analisis data evIEWS

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil output uji *White* dari nilai *Obs* R-Squared* sebesar 11,37966 dengan nilai *Prob Chi-Square* adalah 0,2506 > signifikansi ($\alpha=5\%$) dengan demikian bahwa data tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

	LNANG_PEND	LNPENGANGGURAN	LNINFLASI
LNANG_PEND	1.000000	0.249157	-0.644860
LNPENGANGGURAN	0.249157	1.000000	0.001262
LNINFLASI	-0.644860	0.001262	1.000000

Sumber : Hasil olahan analisis data evIEWS

Tabel di atas diketahui bahwa hasil output uji multikolinearitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,80 sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinearitas. Uji autokorelasi selanjutnya dengan menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.261227	Prob. F(5,12)	0.1146
Obs*R-squared	10.18740	Prob. Chi-Square(5)	0.0701

Sumber : Hasil olahan analisis data evIEWS

Diketahui dari tabel output diatas, nilai *Prob. Chi Square LM test* lebih besar dari taraf signifikansi 5 % atau dengan kata lain 0,0701 > 0,05. Dengan demikian maka data penelitian dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya karena terbebas dari masalah autokorelasi.

Hasil Model Estimasi Peneleitian

Tabel 5
Hasil Estimasi Model Penelitian

Dependent Variable: LNHLHPENMISKIN				
Method: Least Squares				
Date: 03/03/23 Time: 10:46				
Sample: 2002 2022				
Included observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.01147	0.939070	15.98546	0.0000
LNANG_PEND	-0.069179	0.015756	-4.390764	0.0004
LNPEGANGGURAN	0.078522	0.075502	1.039998	0.3129
LNINFLASI	0.022907	0.033018	0.693775	0.4972
R-squared	0.716642	Mean dependent var		14.23547
Adjusted R-squared	0.666638	S.D. dependent var		0.143511
S.E. of regression	0.082859	Akaike info criterion		-1.973699
Sum squared resid	0.116717	Schwarz criterion		-1.774742
Log likelihood	24.72384	Hannan-Quinn criter.		-1.930520
F-statistic	14.33160	Durbin-Watson stat		0.788717
Prob(F-statistic)	0.000066			

Sumber : Hasil olahan analisis data eviews

Dari hasil output diatas diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda :

$$\text{LNHLHPENDMISKIN} = 15,01147 - 0,069179 \text{ LNANGPEND} + 0,078522 \text{ LNPEGANGGURAN} + 0,022907 \text{ LNINFLASI}.$$

Nilai konstanta bernilai 15,01147 menandakan bahwa apabila variabel anggaran pendidikan, pengangguran, dan inflasi sama dengan nol atau tidak ditingkatkan maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 15,01147 persen, selanjutnya Anggaran Pendidikan apabila ditingkatkan sebesar satu persen maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,069 persen, begitu pula apabila pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0,0785 persen serta apabila inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kemiskinan mengalami kenaikan juga sebesar 0,00229 persen dengan memperhatikan aumsi variabel yang lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi

Uji secara parsial (uji-t) diketahui bahwa variabel Anggaran Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari nilai *probability* (0,0004) < taraf signifikansi (0,05), Sebaliknya variabel pengangguran dan inflasi

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara karena nilai *probability* (0,3129 dan 0,4972) > taraf signifikansi (0,05). Uji secara simultan (uji- F) diketahui bahwa variabel anggaran pendidikan, pengangguran, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Prob (*Fstatistic*) 0,000066 < taraf signifikansi (0,05). Koefisien determinasi dilihat dari nilai R^2 sebesar 0,7166 yang artinya variasi variabel bebas (anggaran pendidikan, pengangguran, dan inflasi) mampu menjelaskan variabel terikatnya (kemiskinan) sebesar 71,66 % sedangkan sisanya 28,34 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Sehingga dengan anggaran yang diberikan pemerintah ke sektor pendidikan akan mengurangi jumlah kemiskinan di Sumatera Utara. Hal ini didukung dengan mekanisme transmisi investasi publik, dimana penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan dapat dilakukan dengan tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan rendah, (2) subsidi harga, subsidi komoditi yang digunakan oleh rumah tangga terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, terutama pada sektor kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, yang diutamakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah. Point ketiga dari mekanisme transmisi investasi publik adalah salah satu usaha pemerintah untuk mengiring kondisi perekonomian kepada pengurangan jumlah/angka kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan.

Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena efek anomali yang terlihat pada kondisi sebelum covid dan pada masa covid yang menyebabkan kondisi pengangguran terbuka semakin meningkat namun kemiskinan dikendalikan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyebabkan naiknya tingkat pengangguran tidak berdampak pada perubahan tingkat kemiskinan.

Inflasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provnsi Sumatera Utara, Hal ini dapat terjadi karena pada beberapa kondisi inflasi dimana harga barang-barang naik dan mengakibatkan mengurangnya daya beli masyarakat membuat masyarakat pada umumnya akan beralih atau menggunakan barang substitusi

untuk beberapa item atau komoditas barang-barang pokok yang terkena imbas dari inflasi atau mengurangi jumlah penggunaan barang yang diperlukan sehingga dikatakan bahwa inflasi tidak signifikan sampai membawa penduduk menjadi tidak berada (miskin) ke level tinggi. Selain itu laju inflasi tidak akan mempengaruhi konsumsi masyarakat di Sumatera Utara dikarenakan variabel lain seperti pendapatan real seseorang juga meningkat. Dengan kata lain fenomena inflasi merupakan keadaan yang dialami untuk kondisi jangka pendek. Disesuaikan dengan permintaan dan penawaran agregat sehingga tidak memberikan efek langsung terhadap kemiskinan.

5. Kesimpulan

Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan anggaran pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan variabel anggaran pendidikan, pengangguran, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa saran yang berikan dari hasil penelitian:

1. Tingkat pengangguran harus diturunkan dengan mempermudah ijin pendirian usaha dan menumbuhkan jiwa wirausaha kepada sumberdaya manusia sehingga peluang terbukanya kesempatan kerja semakin besar, dan banyak tenaga kerja yang terserap yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Diharapkan pemerintah Sumatera Utara dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dengan mengurangi pengeluaran penduduk miskin atas kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial.
3. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Sumatera Utara, peningkatan sumber daya manusia akan menjadi modal utama masyarakat Sumatera Utara dengan melakukan upaya seperti peningkatan fasilitas pendidikan dari anggaran pendidikan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk memasukkan unsur kesehatan, dan infrastruktur sebagai salah satu faktor yang diteliti karena unsur ini dianggap cukup berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2004), .Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Desa., Jakarta.
- Gujarati, Damodar. (2002), .Ekonometrika Dasar., Erlangga, Surabaya.
- Mankiw, N Gregory. (2003), .Macroeconomics, Fifth Editions., Worth Publishers, 41 Madison Avenue, New York.
- Marbun, Riko. (2009), .Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia., Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sembiring. (2011),. Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten Karo di Sumatera Utara, Tesis Universitas Sumatera Utara,, Medan.
- Sukirno, Sadono. (2002), .Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi Ketiga., Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumanta, Jaka. (2005), .Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia., Jurnal Kebijakan Ekonomi, Jakarta.
- Suparmoko. (2002), .Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah., Andi Offset, Yogyakarta.
- Todaro, M.P. (2003), .Economic Development in the Third World., Longman, 6th Edition, London.
- World Bank. (2007), .Poverty and Social Impact Analysis., World Bank Publication.
<http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Poverty%20Brief%20February%202013-%20Bahasa%20version.pdf>. Diakses tanggal 07 Februari 2023.
- <http://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2012/12/Gagal-Dalam-Penanggulangan-Kemiskinan.pdf>, Diakses tanggal 07 Februari 2023.
- http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/12_Sumut.pdf, Diakses tanggal 07 Februari 2023.
- <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/TNP2K.pdf>, Diakses tanggal 07 Februari 2023.
- <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/anggaran-pendidikan> diakses tanggal 01 Maret 2023.
- <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/21/alokasi-anggaran-pengentasan-kemiskinan> diakses tanggal 01 Maret 2023.